

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
MASJID RAYA BAITURRAHMAN
ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIZKA FARAH DIBA

NIM. 210802059

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizka Farah Diba
NIM : 210802059
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 09 September 2003
Alamat : Jl. Wedana, Lhong Raya, Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



RIZKA FARAH DIBA

NIM. 210802059

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

MASJID RAYA BAITURRAHMAN

ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

RIZKA FARAH DIBA

NIM: 210802059

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Siti Nur Zalikha, M.Si
NIP. 199002282018032001

Pembimbing II,



Cut Zamharira, S.I.P, M.A.P
NIP. 197911172023212012

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH

SKRIPSI

RIZKA FARAH DIBA

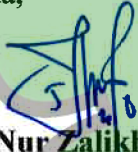
NIM: 210802059

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Agustus 2025 M
20 Safar 1447 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Sekretaris,


Cut Zamharira, S.I.P., M.P.A.
NIP. 197911172023212012

Penguji I,


Dr. Saif Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Penguji II,


Putri Marzanar, MPA.
NIP. 199811022024032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

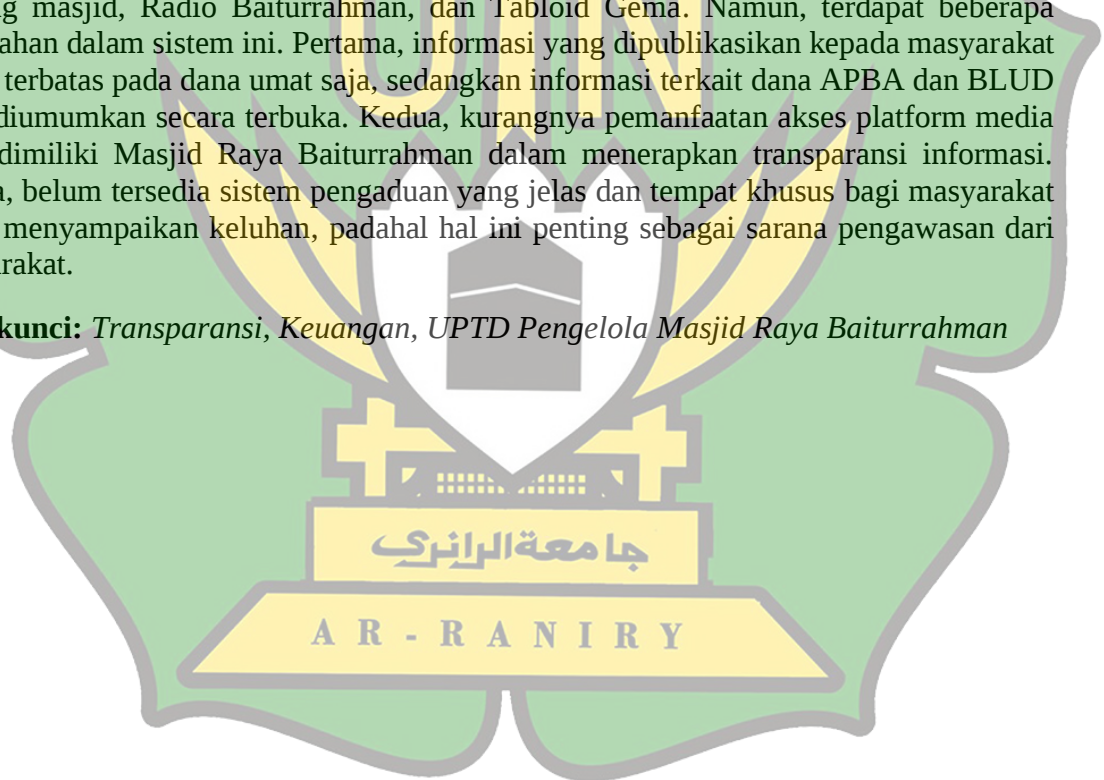



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Masjid Raya Baiturrahman merupakan masjid provinsi yang dikelola UPTD pengelola Masjid Raya Baiturrahman di bawah Dinas Syariat Islam Aceh dengan status BLUD berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018. Sebagai pengelola fasilitas publik yang mengelola dana APBA, BLUD dan dana umat UPTD memiliki kewajiban menerapkan transparansi keuangan. Namun, pengelolaan keuangan masih menghadapi tantangan transparansi, terutama sistem pelaporan yang belum optimal dan minimnya digitalisasi akses informasi, hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan keuangan oleh UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan UPTD telah menerapkan sistem transparansi bertingkat dengan baik dalam pengelolaan dana umat melalui pengumuman rutin Jumat, publikasi di papan dinding masjid, Radio Baiturrahman, dan Tabloid Gema. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam sistem ini. Pertama, informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat hanya terbatas pada dana umat saja, sedangkan informasi terkait dana APBA dan BLUD tidak diumumkan secara terbuka. Kedua, kurangnya pemanfaatan akses platform media yang dimiliki Masjid Raya Baiturrahman dalam menerapkan transparansi informasi. Ketiga, belum tersedia sistem pengaduan yang jelas dan tempat khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, padahal hal ini penting sebagai sarana pengawasan dari masyarakat.

Kata kunci: *Transparansi, Keuangan, UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat pengikut-Nya. Adapun judul skripsi ini, yaitu **Transparansi Pengelolaan Keuangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Masjid Raya Baiturrahman Aceh.**

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ibunda tercinta Miftahul Jannah SE, M.Si dan ayahanda Salman yang telah merawat, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta senantiasa mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dan penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B. Sc, MPA., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Eka Januar M.Soc.Sc., Penasehat Akademik yang telah membantu dalam rencana studi selama perkuliahan.
6. Siti Nur Zalikha M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.

7. Cut Zamharira, S.I.P., M.A.P., Dosen Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan selalu memberi masukan serta memotivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen di lingkungan prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
9. Terima kasih kepada saudara kandung M. Hafidz Syukrillah, M. Farid Wajdi, Putri Yumna Salsabilla, dan bunda Tercinta Maulizar Sari S.E, M.Si., dan Nur Rahma Dany yang telah senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
10. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Prodi Ilmu Administrasi Negara khususnya para sahabat kepada Ifitahul Jannah, Della Ariska Fitri, Putri Rizki Rahmatillah dan Dinatuzahra yang telah membantu, memotivasi, dan menyemangati penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi, dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berusaha yang terbaik dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan cukup diharapkan penulis demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, 27 Juli 2025

جامعة الرانري

A R - R A N I R I

RIZKA FARAH DIBA

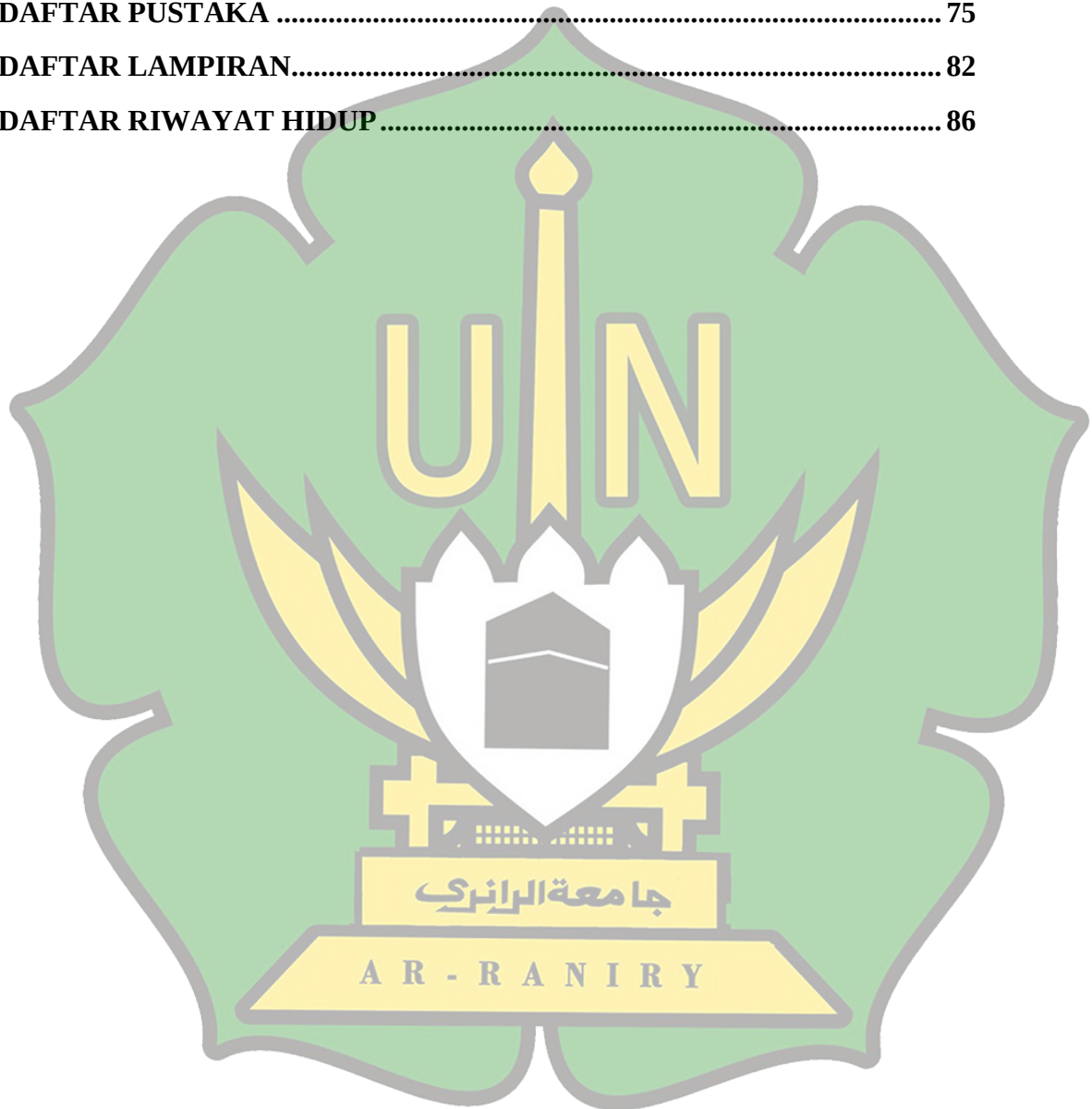
NIM. 210802059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Transparansi	11
2.1.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian (Jenis dan Pendekatan)	28
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.4 Sumber data	31

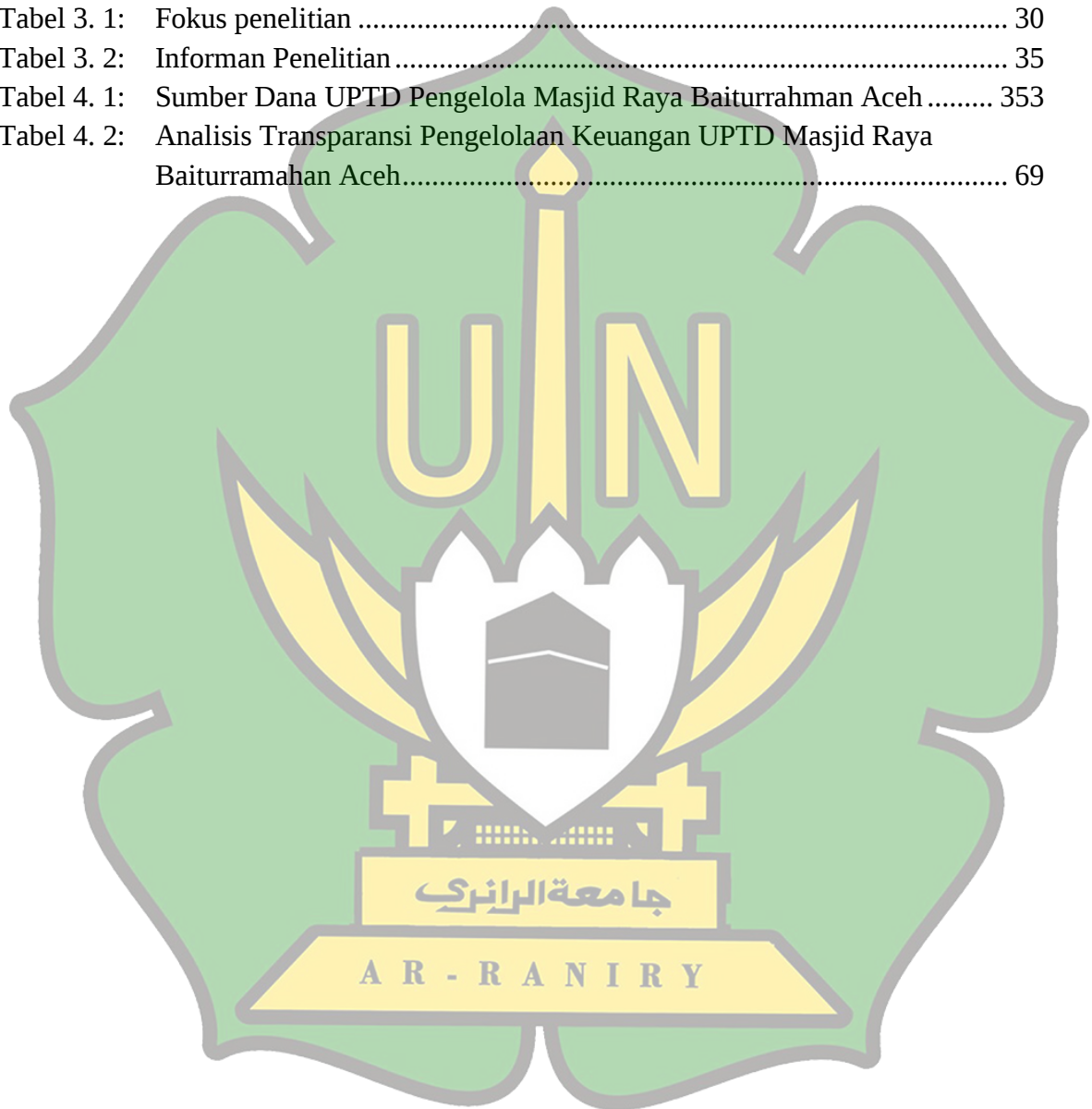
3.4.1	Data Primer	31
3.4.2	Data Sekunder	31
3.5	Teknik pengumpulan data.....	32
3.5.1	Wawancara	32
3.5.2	Observasi	33
3.5.3	Dokumentasi	34
3.6	Informan Penelitian	35
3.7	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	36
3.7.1	<i>Credibility</i>	36
3.7.2	<i>Transferability</i>	37
3.7.3	<i>Dependability</i>	38
3.7.4	<i>Confirmability</i>	39
3.8	Teknik Analisis Data.....	39
3.8.1	Pengumpulan data	40
3.8.2	Reduksi Data	40
3.8.3	Penyajian Data	41
3.8.4	Penarikan kesimpulan atau Verifikasi.....	41
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4. 1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.2	Visi Misi UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman	49
4. 2	Hasil Penelitian	50
4. 1	Transparansi Pengelolaan Keuangan melalui Penyediaan Informasi Yang Jelas.....	51
4.2.2	Transparansi Pengelolaan Keuangan melalui Kemudahan Akses Informasi	59
4.2.3	Transparansi Pengelolaan Keuangan melalui Penyusunan Mekanisme Pengaduan Jika Ada Peraturan Yang Dilanggar Atau Permintaan Untuk Membayar Uang Suap.....	64
4.2.4	Transparansi Pengelolaan Keuangan melalui Meningkatkan Arus Informasi Melalui Kerjasama Dengan Media Dan Lembaga Non-Pemerintah.....	67
4. 3	Pembahasan Penelitian.....	71

BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR LAMPIRAN.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 :	Literature Review	21
Tabel 3. 1:	Fokus penelitian	30
Tabel 3. 2:	Informan Penelitian	35
Tabel 4. 1:	Sumber Dana UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh	353
Tabel 4. 2:	Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1: Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4. 1: Masjid Raya Baiturrahman Sebelum Renovasi dan Masjid Raya Baiturrahman sesudah Renovasi	45
Gambar 4. 2: Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam.....	47
Gambar 4. 3: Struktur UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh yang berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018.....	48
Gambar 4. 4: Papan Dinding Informasi Keuangan di Sebelah Utara dan Sebelah Selatan Masjid Raya Baiturrahman.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Bimbingan	822
Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian.....	833
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Selesai Penelitian	834
Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada di belahan barat Indonesia. Provinsi yang saat ini dikenal sebagai Aceh ini telah mengalami beberapa perubahan nama resmi, mulai dari pada tahun (1959-2001) Aceh dikenal sebagai Daerah Istimewa Aceh kemudian berubah menjadi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2001-2009 sebelum pada akhirnya menjadi Aceh yang kita kenal sekarang. Menurut data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh, Provinsi Aceh memiliki total area sebesar 5.677.081 hektar. Dari keseluruhan luas wilayah tersebut, area hutan mendominasi dengan luas 2.270.080 hektar. Perkebunan yang dikelola oleh masyarakat menempati posisi kedua terluas dengan area 700.350 hektar. Sementara itu, kawasan industri merupakan area dengan luas paling kecil, yang hanya mencakup 2.096 hektar dari total luas provinsi¹.

Provinsi Aceh memiliki sejarah panjang dan identitas yang khas, dimana Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki otonomi khusus termasuk dalam penerapan syariat Islam pada tata kelola masyarakatnya. Provinsi Aceh dikenal sebagai "Serambi Mekkah" karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Keberadaan Islam di Aceh memiliki sejarah panjang sejak masa Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-16². Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh yang sangat kental

¹ Badan Penghubung Pemerintah Aceh, "Profil Aceh," 2023, <https://penghubung.acehprov.go.id/>.

² Arif Rahman, "Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan Dan Menyebarkan Islam Di Nusantara Pada Abad 16-18 M," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021): 1333–44, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.21894>.

dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam aspek budaya, hukum, dan sistem pemerintahan. Aceh juga menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara resmi yang diatur melalui Qanun (peraturan daerah berbasis hukum Islam). Penerapan Syariat Islam ini mendapat legitimasi khusus melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakatnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam³.

Umat Islam memiliki tempat khusus untuk beribadah yang disebut sebagai masjid. Masjid juga dikenal dengan istilah “Baitullah” yang berarti rumah Allah. Fungsi utama masjid adalah sebagai pusat kegiatan keagamaan Islam, termasuk sholat, berdoa, membaca Al-Qur'an, mengikuti pengajian, dan melaksanakan berbagai bentuk ibadah lainnya. Keberadaan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat Aceh mencerminkan kuatnya nilai-nilai Islam yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh selama berabad-abad. Dengan status sebagai daerah istimewa yang menerapkan syariat Islam⁴.

Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat dan BPS mencatat bahwa Aceh memiliki sekitar 4.269 masjid yang tersebar di seluruh wilayah, mulai dari Masjid Raya Baiturrahman sebagai ikon spiritual hingga masjid-masjid kecil di tingkat gampong yang menjadi sentra aktivitas keagamaan masyarakat⁵. Peran masjid dalam kehidupan umat Islam Aceh tidak hanya terbatas pada fungsi ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan,

³ Misran Misran, “Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 1, no. 2 (2017): 78–86, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1423>.

⁴ Ahmad Rifa'i, “Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern,” *Universum* 10, no. 2 (2016): 155–63, <https://doi.org/10.30762/universum.v10i2.256>.

⁵ Biyu, “Pembangunan Masjid Di Aceh Meningkatdrastis-,” *diaklesis.com*, 2024, <https://dialeksis.com/data/pembangunan-masjid-di-aceh-meningkat-drastis->

pembinaan akhlak, dan penguatan identitas keislaman yang telah menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi masyarakat Aceh yang religius dan taat pada ajaran Islam⁶.

Adapun masjid yang sangat familiar di Aceh adalah Masjid Raya Baiturrahman, masjid ini merupakan masjid agung tingkat provinsi yang bertepatan di Provinsi Aceh. Selama Provinsi Aceh dipimpin Gubernur Zaini Abdullah (2012-2017) Masjid Raya Baiturrahman mengalami renovasi besar dengan anggaran sekitar 1,4 triliun rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa proyek penting, termasuk pembangunan 12 payung elektrik yang masing-masing berharga 10 miliar rupiah per unit. Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk membangun basement yang berfungsi sebagai tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat, pembuatan area wudhu, serta renovasi beberapa bagian interior masjid. Proyek penataan landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman ini dimulai pada tahun 2015 dan berhasil diselesaikan pada Mei 2017. Payung-payung elektrik tersebut ditempatkan di halaman masjid sebagai bagian dari pembaruan fasilitas, dan ini juga menjadi salah satu pusat perhatian baru Masjid Raya Baiturrahman Aceh saat ini⁷.

Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh. Adapun terdapat sumber pendapatan yang mendukung aktivitas pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman tersebut diantaranya seperti pendapatan dari dana umat, APBA dan layanan jasa yang

⁶ Fitriani Yusra, "PERAN MASJID SEBAGAI MEDIA DAKWAH DI LINGKUNGAN PERKANTORAN PADA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (P3KHAN LAN RI)" 5, no. 1 (2019): 1–11.

⁷ Bustami Abubakar, "Masjid Raya Baiturrahman: Situs Sejarah Dan Budaya Di Kota Banda Aceh" 2 (2017): 2588–93.

terdiri dari pengelolaan parkir, penitipan sandal, WC umum, dan sumbangan akad pernikahan⁸.

Masjid Raya Baiturrahman Aceh merupakan salah satu masjid bersejarah dan landmark penting di Kota Banda Aceh yang dikelola oleh UPTD. Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah Aceh, UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh bertanggungjawab dalam mengelola berbagai aspek operasional masjid, termasuk pemeliharaan infrastruktur, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan pengelolaan keuangan. Masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Aceh ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan dan destinasi wisata religi yang dikunjungi oleh ribuan wisatawan setiap tahunnya⁹.

Sebagai unit pelaksana teknis yang mengelola fasilitas publik dan dana masyarakat, UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip transparansi dalam seluruh aspek pengelolaannya terutama dalam hal keuangan. Transparansi menjadi nilai fundamental yang harus ditegakkan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBA maupun sumbangan masyarakat. Penerapan transparansi tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga sebagai wujud amanah dalam mengelola fasilitas publik yang memiliki nilai religius dan historis yang tinggi bagi masyarakat Aceh¹⁰.

⁸ Humas DSI, "Dengan Kehadiran UPTD Pengelolaan Keuangan Masjid Lebih Transparan," Website Dinas Syariat Islam, 2023, <https://dsi.acehprov.go.id/berita/kategori/mimbar-baiturrahman/dengan-kehadiran-uptd-pengelolaan-keuangan-masjid-lebih-transparan>.

⁹ Nurul Mahfudhah and Alamsyah Taher, "Masjid Raya Baiturrahman Sebagai Wisata Sejarah Dan Budaya Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Pendidikan Geosfer* 7, no. 1 (2022): 54–62, <https://doi.org/10.24815/jpg.v7i1.23348>.

¹⁰ Dyah Novitasari and Lailatul Amanah Amanah, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6, no. 12 (2016).

Transparansi keuangan publik bermakna bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat, hal ini dapat melibatkan penggunaan berbagai media untuk mengkomunikasikan bagaimana dana yang berasal dari masyarakat dapat dikelola dan digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya¹¹. Informasi tersebut bisa diakses oleh semua pihak yang memiliki kepentingan agar bisa mengevaluasi secara keseluruhan bahwa pemerintahan telah menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka untuk publik. Transparansi keuangan publik dianggap sangat penting karena dapat mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik serta dapat terwujudnya penyelenggaraan negara yang cukup baik yaitu dengan transparansi, efektif dan efisien¹².

Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan wisata religi yang ramai dikunjungi¹³, dengan pengelolaan dana yang berasal dari berbagai sumber dan dalam jumlah yang besar tuntutan akan transparansi pengelolaan keuangan menjadi semakin penting untuk membangun kepercayaan publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai donatur dan penerima manfaat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Transparansi dalam pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup keterbukaan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana, tetapi juga akuntabilitas dalam

¹¹ Edah Jubaedah, "Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi* VIII, no. 34 (2011): 288–99.

¹² Agustinus Salle, "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah," *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)* 1, no. 1 (2017): 1–19, <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740>.

¹³ Muhammad Fadhly Ihsanuddin, "Skripsi Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh," n.d.

setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi dana kepada masyarakat¹⁴.

Masjid Raya Baiturrahman ini dikelola oleh Pemerintahan Aceh yang memiliki status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pengawasannya dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. BLUD ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam. Menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan seperti Aceh, Pemerintahan Aceh, UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Dewan Pengawas, dan Pejabat Pengelola UPTD dengan tujuan untuk menciptakan sinergi antara Pemerintah Aceh dan UPTD dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan. UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman dikelola berdasarkan 4 prinsip yaitu; Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dan Independensi¹⁵.

Kemajuan teknologi informasi dalam era globalisasi saat ini menuntut pemerintah untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi, khususnya informasi yang bersifat umum dan penting bagi masyarakat. Bahkan salah satu ciri utama kemajuan kota dan menjadi kota yang pintar (*smart city*) yang sedang dituju oleh banyak kota di dunia adalah adanya keterbukaan informasi kepada warga. Dengan keterbukaan tersebut masyarakat bisa turut ambil bagian dan bekerja sama dengan pemerintah untuk

¹⁴ Iqbal Syauqi Mubarak and Moh Idris, “Penerapan Indikator Transparansi Dalam Website Donasi Online,” *Universitas Islam Indonesia* 31 (2022): 9.

¹⁵ Keuangan Badan Layanan et al., “Kelola Teknis Masjid Aceh Aceh,” 2017, 2–19.

menentukan keputusan yang lebih baik termasuk juga dalam menjaga Masjid Raya Baiturrahman¹⁶.

Masjid Raya Baiturrahman merupakan salah satu masjid yang sudah menggunakan konsep digitalisasi akan tetapi hal ini belum direalisasikan dengan sepenuhnya dalam kemudahan aksesnya secara digitalisasi, dalam pemanfaatan media sosial dan pengelolaan pendapatan yang termasuk kedalam pelaporan keuangan tersebut seperti QRIS dan wakaf¹⁷. Pengelolaan harta wakaf di Masjid Raya Baiturrahman masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi pemanfaatannya. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah ketiadaan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akurat terkait pengelolaan aset wakaf. Kondisi ini telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat mengenai akuntabilitas pengelolaan harta wakaf di masjid tersebut¹⁸.

Minimnya transparansi dalam pengelolaan aset wakaf telah berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Masjid Raya Baiturrahman sebagai lembaga pengelola wakaf. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya persepsi bahwa pengelolaan aset wakaf belum dilakukan secara maksimal, dimana masih terdapat sejumlah aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara produktif untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Situasi ini menunjukkan perlunya perbaikan

¹⁶ Suha Alawadhi et al., "Building Understanding of Smart City Initiatives," *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* 7443 LNCS (2012): 40–53, https://doi.org/10.1007/978-3-642-33489-4_4.

¹⁷ Muhammad Akmal Karazi, "Implementasi Digitalisasi Masjid Di Kota Banda Aceh Kasus Pada Kecamatan Syiah Kuala (Masjid Besar Syuhada Lamgugop Dan Masjid Jami' Al-Wustha Jeulingke)," *Universitas Negeri Ar-Raniry*, 2023, 1–100.

¹⁸ Ihsanuddin, "Skripsi Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh."

dalam sistem pengelolaan pelaporan keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan kepercayaan publik¹⁹.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana mengatur keterbukaan informasi publik untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi dan peraturan. Kemudian Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Pada Dinas Syariat Islam Aceh yang berisi tentang mengatur tata kelola teknis pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh sebagai UPTD di bawah Dinas Syariat Islam Aceh, termasuk pengelolaan keuangan, organisasi, dan pengawasan agar pengelolaan masjid berjalan transparan, akuntabel, dan profesional²⁰.

Masjid Raya Baiturrahman sebagai masjid provinsi telah mengalami perubahan signifikan dalam sistem pengelolaannya, dimana berdasarkan peraturan terbaru, pengelolaan masjid yang sebelumnya dilakukan oleh dua pihak kini dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah melalui UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman di bawah naungan DSI Aceh. Perubahan sistem pengelolaan ini menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam, antara lain belum adanya evaluasi menyeluruh mengenai efektivitas pengelolaan keuangan Masjid Raya Baiturrahman pasca peralihan ke UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman yang memerlukan analisis transparansi dalam pengelolaan dana publik, adanya kekhawatiran masyarakat

¹⁹ Ihsanuddin.

²⁰ “Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Pada Dinas Syariat Islam Aceh.Pdf,” n.d.

terkait transparansi pengelolaan keuangan masjid yang kini berada di bawah kendali pemerintah dimana kurangnya informasi yang jelas mengenai mekanisme transparansi keuangan dapat menimbulkan keraguan publik terhadap tata kelola yang baik, serta potensi dampak dari pengelolaan keuangan yang tidak optimal yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat dan mempengaruhi citra pemerintahan Aceh secara keseluruhan mengingat pentingnya Masjid Raya Baiturrahman sebagai simbol keagamaan dan kebanggaan masyarakat Aceh. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis tingkat transparansi pengelolaan keuangan Masjid Raya Baiturrahman oleh UPTD.

Maka dari itu untuk mengukur sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan Masjid Raya Baiturrahman peneliti memilih konsep transparansi. Dikarenakan dengan konsep tersebut dapat menunjukkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman dalam mengelola keuangan. Adapun indikator transparansi yang digunakan peneliti untuk mengukur penyediaan dan kemudahan akses dalam bentuk digitalisasi yang dapat memberikan informasi bagi publik. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Transparansi Pengelolaan Keuangan UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut, “Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan oleh UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang mengaju pada rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana UPTD yang dibawah oleh DSI Aceh ini dapat mengelola Masjid Raya Baiturrahman terhadap laporan keuangannya, yang semulanya dikelola juga oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yakni remaja masjid dan khadamnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki 2 kegunaan/ manfaat:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan teori melalui penelitian yang dilaksanakan, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya mengenai transparansi pengelolaan keuangan Masjid raya Baiturrahman.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan terutama dalam transparansi pengelolaan keuangan Masjid raya Baiturrahman. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penerapan transparansi yang baik terhadap pengelolaan keuangan Masjid raya Baiturrahman oleh UPTD tersebut, dan diharapkan bisa memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat terkait pengelolaan keuangan Masjid Raya Baiturrahman.